

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dipaparkan secara luas, anggaran dapat dipandang selaku alat manajemen demi merujuk peran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga diperlukan informasi dan data dengan kualitas terkendali maupun tidak terkendali yang digunakan sebagai bahan estimasi dalam penyusunannya (Widowati & Fatimah, 2022). Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menutup berbagai kesenjangan, mendorong keseimbangan ekonomi makro, memberikan arah penggunaan sumber daya yang tersedia di masyarakat, dan memungkinkan dilakukannya evaluasi yang cepat dan akurat (Adisasmita, 2014).

Kinerja sektor publik dapat dicirikan sebagai produk akhir atau bentukan dari perlakuan atau aktivitas yang akan digapai sedalam dengan pemakaian pengeluaran dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi penilaian kinerja. Dengan adanya sistem *reward and punishment* akan memperkuat pengukuran kinerja, sehingga dapat digunakan sebagai alat perlindungan instansi (Milenia et al., 2022).

Istilah "efektivitas" dapat merujuk pada hampir semua jenis *input* (proses) dan *output* yang dipengaruhi oleh hasil kinerja organisasi, yang biasanya menguraikan tujuan organisasi dan mengindikasikan seberapa baik kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan tersebut (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023).

Secara khusus, pertumbuhan pengeluaran adalah tingkat kenaikan seluruh konsumsi oleh pemerintah. Sebagai elemen penting yang perlu dipastikan yaitu rasio pertumbuhan belanja untuk menentukan apakah kinerja anggaran pemerintah meningkat secara tepat. Keseimbangan harus dijaga untuk mencegah gangguan terhadap keberlanjutan dan kesehatan fiskal daerah, yang dapat disebabkan oleh variasi tingkat inflasi, resonansi nilai rupiah, pergeseran cakupan layanan, dan perubahan faktor ekonomi makro (Wahyuni, 2018).

Seberapa banyak uang yang diserap oleh pengukuran kinerja dapat diamati dengan menghitung varians belanjanya. Untuk memastikan kenaikan anggaran setiap tahun, gunakan studi pertumbuhan anggaran. Untuk memeriksa alternatif

kinerja anggaran lainnya, gunakan analisis keserasian dalam belanja. Menemukan keseimbangan antara pengeluaran adalah tujuan dari pemeriksaan ini. Selain itu, pengeluaran anggaran dapat digunakan untuk menghitung jumlah penghematan melalui penggunaan rasio efisiensi.

Kegagalan perencanaan dapat diakibatkan oleh anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja, oleh karena itu penganggaran dalam organisasi sektor pemerintah merupakan proses politik. Anggaran di sektor pemerintah harus terbuka dan transparan untuk memungkinkan adanya opini publik, tujuan diskusi, dan masukan (Widowati & Fatimah, 2022).

Anggaran bisnis komersial dan publik memiliki dampak yang besar. Meskipun sebagian besar bisnis akan berusaha sekuat yang dibisa mungkin untuk meraih target yang telah ditentukan, masalah kinerja akan selalu muncul.

Faktanya, sebagian besar dari mereka mampu memenuhi target realisasi 90% untuk realisasi anggaran pada akhir tahun di Indonesia pada tahun 2021. Di sisi lain, sebaran pola penyerapannya pun belum merata dan sebanding. Pola realisasi belanja pemerintah yang tinggi namun tidak merata realisasinya, masih berada di Kuadran II matriks kesenjangan realisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi yang tinggi, yang merupakan kondisi maksimal, belum dicapai oleh realisasi belanja. Penyerapan anggaran yang tidak merata pada saat itu merupakan masalah utama dalam pelaksanaan anggaran dan menumpuk di akhir tahun (Mukhtaromin, 2022).

Hingga akhir tahun 2016, belanja APBN Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp16,49 triliun, atau 85,3% dari pagu Rp19,33 triliun. Jumlah riil anggaran 2016 adalah Rp19,3 triliun, atau 7,7% lebih rendah dari anggaran 2015. Pada 82,4%, anggaran belanja barang juga lebih rendah dari yang diharapkan. Penurunan jumlah realisasi belanja APBN di Sumatra Utara, menurut ekonom Gunawan Benjamin, mengimplikasikan bahwa mungkin telah terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak tepat guna di daerah tersebut, yang tidak menguntungkan karena penyerapannya tidak mencapai 100% (Milenia et al., 2022).

Tabel 1. 1

## Target dan Realisasi Belanja Kota Padangsidempuan Tahun 2022

Triwulan	Bulan	Target (%)	Capaian (%)
Triwulan I	Januari	9,8	0
	Februari	18,1	0
	Maret	28,5	6,3
Triwulan II	April	44	8,6
	Mei	50,5	18,3
	Juni	59,5	19,8
Triwulan III	Juli	71,5	31,1
	Agustus	77,3	39,4
	September	82,3	48,2
Triwulan IV	Oktober	88	51,9
	November	91,8	57,6
	Desember	95,4	85,3

Sumber: PRP2 Kota Padangsidempuan

Kondisi penyerapan anggaran untuk Kota Padangsidempuan dapat dicermati pada Tabel 1.1 Proses pengelolaan anggaran dapat diakibatkan oleh penundaan penyerapan anggaran belanja yang tidak dilakukan di awal tahun. Meskipun penyerapan anggaran meningkat setiap bulannya, namun pada bulan Januari dan Februari di Triwulan I semester pertama tidak dapat memenuhi target dengan capaian 0%. Pola penyerapan anggaran setiap semester konsisten dan kurang dari 50%. Ketika tren penyerapan meningkat menjelang akhir semester, ada kemungkinan bahwa hal tersebut akan membahayakan tanggung jawab keuangan negara dengan membuat kegiatan-kegiatan yang tidak penting menjadi penting di penghujung waktu, yang berakibat pada perencanaan kegiatan yang tidak matang dan penurunan kualitas (Oktaviani, 2020).

Evaluasi kinerja melalui Laporan Pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan target produksi, tetapi juga kualitas, *output*, atau dampak jangka panjang yang dapat dilihat sejak awal tahun anggaran. Untuk mencegah terjadi penumpukan dana di akhir tahun anggaran, laksanakan kegiatan secara tepat waktu dan terjadwal, identifikasi dan percepat kegiatan yang dapat segera diselesaikan, serta lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulannya

sesuai dengan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Secara ekonomi, penundaan penyerapan anggaran dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ariwibawa, 2022).

Akuntansi sektor publik sering menjadi sasaran inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan organisasi yang secara konsisten merugi (Nugroho et al., 2021). Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan secara umum merupakan pengguna sektor publik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan merupakan salah satu instansi pemerintah yang diamanahkan untuk membantu walikota dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kompetensi pemerintah daerah dan menjadi kewajiban daerah.

**Tabel 1. 2**

**Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio</b>
2018	6.143.037.152	5.784.953.922	94%
2019	6.709.888.193	6.088.513.316	90%
2020	5.947.325.293	5.385.107.873	90%
2021	6.177.951.582	5.629.708.232	91%
2022	7.453.270.294	6.982.526.014	93%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan*

Pada periode 2018 anggaran sebesar 6.143.037.152 dan realisasi sebesar 5.784.953.922 dengan rasio 94% dinyatakan kurang efisien. Di tahun tersebut juga terdapat biaya perjalanan dinas yang seharusnya bisa dihemat dari perjalanan dinas selama dua hari menjadi sehari dengan dilakukan tanpa adanya biaya liburan di hari kedua. Pada tahun 2019 anggaran sebesar 6.709.888.193 dan realisasi sebesar 6.088.513.316 dengan rasio 90% dinyatakan efisien. Pada tahun 2020 anggaran sebesar 5.947.325.293 dan realisasi sebesar 5.385.107.873 dengan rasio 90% dinyatakan efisien.

Pada tahun 2021 anggaran sebesar 6.177.951.582 realisasi anggaran sebesar 5.629.708.232 dengan rasio 91% dinyatakan kurang efisien. Pada tahun 2022 anggaran sebesar 7.453.270.294 dan realisasi anggaran 6.982.526.014 dengan

rasio 93% dinyatakan kurang efisien. Pada tahun tersebut ditemukan biaya tanah dan bangunan yang seharusnya biaya tersebut bisa dihemat karena tanah dan bangunan sudah ada di realisasi tahun 2021.

Rasio efisiensi anggaran dapat digunakan untuk mengukur penghematan pemerintah dalam penggunaan anggaran. Menurut Keputusan Mendagri No.690.900.327 tahun 1996 mengatakan bahwa jika rasio efisiensi kurang dari 90%, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah menggunakan anggaran secara cukup efisien. Belum melakukan tingkat penghematan jika rasio efisiensi melebihi 90% dalam serapan anggaran.

Rendah dan lambatnya penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga daerah di Indonesia selalu terjadi setiap tahun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, namun fakta di lapangan masih menunjukkan belum adanya perubahan ditemukan terkait penyerapan anggaran (Nurlaila et al., 2023)

Dari sisi transparansi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan sendiri dapat dikatakan kurang menyampaikan informasi kepada publik karena berdasarkan wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan, rincian anggaran untuk tahun laporan 2018-2022 tidak tersedia di situs resmi Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Artinya, laporan realisasi anggaran tidak tersedia. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi masalah dari sudut pandang masyarakat ketika mengevaluasi organisasi pemerintah daerah. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi peneliti terkait kinerja dalam mengelola anggaran pemerintah, yang berawal dari tujuan penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

Anggaran yang direncanakan harus dipublikasikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Transparan didefinisikan bahwa wakil rakyat dan begitu juga masyarakat harus mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran negara dengan sejelas-jelasnya (Hasanah & Fauzi, 2017).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena konteks historis dari latar belakang masalah yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penggunaan**

## **Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Gambaran masalah yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar bagi penjabaran perumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Berapa besar varians belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022?
2. Berapa besar pertumbuhan belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022?
3. Berapa besar keserasian belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022?
4. Berapa besar efisiensi belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut, merujuk dari topik masalah di atas untuk:

- a. Memahami varians belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022.
- b. Memahami pertumbuhan belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022.
- c. Memahami keserasian belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022.
- d. Memahami rasio efisiensi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini:

#### a) Bagi Penulis

Semoga riset ini dapat menjadi informatif, khususnya yang berkaitan dengan analisis efektivitas penggunaan anggaran dalam mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan.

b) Bagi Instansi

Sebagai antisipasi dan perbaikan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan diprediksi akan mendapatkan masukan dari penelitian ini.

c) Bagi Akademisi

Semoga riset ini dapat menjadi sumber informasi untuk membantu memberikan referensi dalam menyajikan analisis merujuk pada seberapa baik penggunaan anggaran belanja untuk mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan.

d) Bagi Pemerintah

Hasil yang ditargetkan dari penelitian ini adalah penilaian terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dan penilaian terhadap kinerja anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan.

